

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan daerah dimana permukiman penduduk dan segala hal didalamnya diatur oleh undang-undang yang berlaku. Kota pada dasarnya memiliki ciri yang berbeda tergantung fungsi dan kebutuhannya. Kota sebagai pusat ekonomi dan bisnis serta pemerintahan seperti DKI Jakarta sudah tentu memiliki daya tarik yang besar dengan segala fasilitas, sarana, prasarana serta upah minimum yang lebih tinggi.

DKI Jakarta saat ini masih menjadi ibukota negara dan pusat bisnis. Hal ini membuat DKI Jakarta menjadi tujuan masyarakat dalam mencari penghasilan yang menjanjikan. Berdasarkan data yang telah dihimpun pada Maret 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat sebanyak 7.421 jiwa penduduk yang datang bermigrasi ke kota DKI Jakarta.

Berdasarkan data per tahun 2019 Badan Pusat Statistik yang selanjutnya akan disebut BPS, mencatat jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 11.063.324 jiwa, jumlah ini sudah termasuk WNA sebanyak 4.380 jiwa . Jika dihitung dengan luas wilayah DKI Jakarta yang hanya 662,33 km² menurut Keputusan Gubernur No 171 Tahun 2007, berarti kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini mencapai 16.704 jiwa/km², menjadikan DKI Jakarta sebagai kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. (Statistik Jakarta)

Wilayah yang menjadi tujuan para pendatang umumnya adalah kota yang berada di zona penglaju atau daerah pinggiran kota. Semakin mudahnya akses menuju pusat kota dan biaya hidup yang cukup murah membuat pendatang memilih untuk tinggal di wilayah ini. Zona penglaju berada di kota Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wilayah yang paling tinggi didatangi adalah kota Jakarta Timur sebanyak 2.215 jiwa lalu kota Jakarta Barat sebanyak 1.886 jiwa dan yang paling sedikit di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 18 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta) Kota Jakarta Barat terdiri dari delapan kecamatan, dengan Kecamatan Cengkareng sebagai

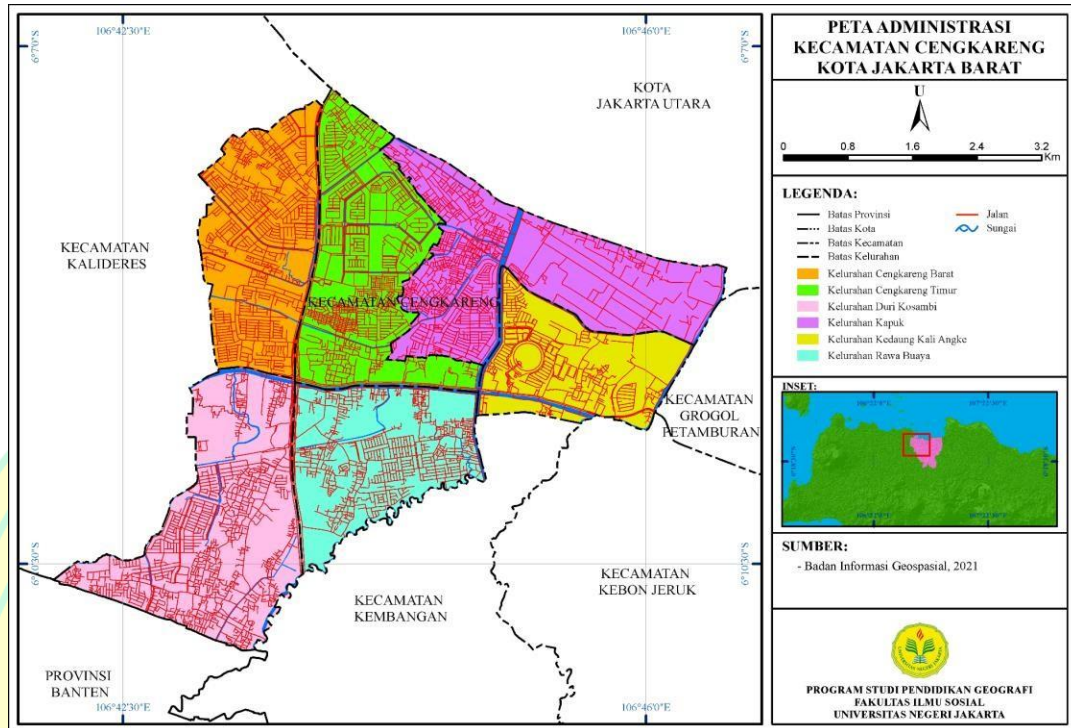
kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Jakarta Barat. Kepadatan penduduk yang tinggi mempengaruhi ancaman bencana, seperti bencana kebakaran. Berikut adalah tabel frekuensi kejadian kebakaran di Kota Jakarta Barat dari tahun 2013-2018;

Tabel 1. Frekuensi Kejadian Kebakaran di Kota Jakarta Barat Tahun 2013-2018

No.	Kecamatan	Frekuensi (tahun)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kembangan	24	34	26	33	36	60
2.	Kebon Jeruk	32	25	19	35	43	53
3.	Palmerah	18	18	4	17	25	32
4.	Grogol Petamburan	27	33	20	42	33	38
5.	Tambora	34	36	14	28	45	31
6.	Taman Sari	23	13	4	28	18	24
7.	Cengkareng	37	39	16	47	68	70
8.	Kalideres	45	35	18	36	43	55
	Total	240	233	121	266	311	363

Sumber: Sudin Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Barat,
BPBD DKI Jakarta dan BPS Kota Jakarta Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Cengkareng menempati posisi teratas selama periode 2013-2018, ini membuktikan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap bencana karena kenaikan frekuensi yang terjadi setiap tahunnya. Karya ilmiah ini menjadi penting untuk dapat mengetahui seberapa tinggi kerentanan sosial bencana kebakaran di wilayah tersebut. Karena bencana kebakaran merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi dengan kerugian yang juga sangat tinggi. Berikut adalah peta administrasi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat.



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Cengkareng

Kecamatan Cengkareng berbatasan langsung dengan Kecamatan Kalideres di sebelah barat, Kota Tangerang dan Kecamatan Kembangan di sebelah selatan, Kecamatan Penjaringan di sebelah utara dan Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Kebon Jeruk di sebelah timur.

Kecamatan Cengkareng yang menjadi lokasi karya ilmiah ini seluas 26,54km² yang terdiri dari enam kelurahan, yaitu Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Duri Kosambi. Setidaknya sejumlah 514.416 jiwa, 262.093 Penduduk laki-laki dan 252.323 penduduk perempuan yang mendiami wilayah tersebut dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 19.383 jiwa/km².

Terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan karya ilmiah ini, berdasarkan hasil dari penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut;

Tabel 2. Kelas Bahaya Kebakaran Permukiman Kecamatan Cengkareng berdasarkan Kelurahan

No.	Nama Kelurahan	Kelas Bahaya Kebakaran (ha)			Luas Total (ha)
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1.	Duri Kosambi	224,60	95,95	68,77	206,12
2.	Rawa Buaya	200	6,12	0	135,36
3.	Kedaung Kaliangke	58,00	47,07	30,29	339,82
4.	Kapuk	287,26	52,23	0,33	214,36
5.	Cengkareng Timur	165,13	38,12	11,11	268,66
6.	Cengkareng Barat	110,66	158,00	0	389,32

Sumber: Ermalia, 2019

Dari peta dan tabel 2. dapat diketahui bahwa sebanyak 1045,65 ha atau 39,39% di Kecamatan Cengkareng termasuk pada kelas tinggi dan Kelurahan Kapuk menjadi wilayah yang memiliki kelas tinggi terbanyak dengan luas 287,26 ha. Sebanyak 397,49 ha atau 14,97% di Kecamatan Cengkareng termasuk pada kelas sedang dan Kelurahan Cengkareng Barat menjadi wilayah yang memiliki kelas sedang terbanyak dengan luas 158,00 ha. Sebanyak 110,50 atau 4,18% di Kecamatan Cengkareng termasuk pada kelas rendah dan Kelurahan Duri Kosambi menjadi wilayah dengan kelas rendah terbanyak seluas 68,77 ha.

Berdasarkan data frekuensi kejadian bencana kebakaran di Kecamatan Cengkareng dan data kelas bahaya kebakaran permukiman di Kecamatan Cengkareng yang baik keduanya memiliki angka yang tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Cengkareng merupakan kecamatan dengan ancaman bencana kebakaran yang tinggi dan dengan frekuensi yang juga terus bertambah setiap tahun, Kecamatan Cengkareng perlu adanya tinjauan lebih lanjut demi meminimalisir risiko dampak bencana terutama pada tingkat kerentanan sosial karena masyarakat lah yang akan terpapar dampak lebih dulu. Bencana kebakaran akan menimbulkan banyak kerugian, baik harta dan juga nyawa. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan kelalaian manusia, sehingga hal ini dapat dicegah untuk mengurangi dampak yang lebih besar, maka karya ilmiah ini bertujuan untuk melihat lebih dekat seberapa tinggi kerentanan sosial di Kecamatan Cengkareng agar hasilnya dapat menjadi acuan untuk tindakan mitigasi serta penyuluhan tentang kebakaran. Oleh

karena itu diperlukan kajian tingkat kerentanan sosial untuk meminimalisasi risiko bencana kebakaran di wilayah Cengkareng Kota Jakarta Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah dalam karya ilmiah ini berfokus pada tingkat kerentanan sosial bencana kebakaran di Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan karya ilmiah ini untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial bencana kebakaran di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat adapun dapat juga digunakan sebagai bahan acuan guna mitigasi bencana kebakaran atau penelitian relevan lainnya.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan literatur, diaman data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian terkait, jurnal, skripsi, buku, data pemerintah dan internet.

E. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan skoring dan klasifikasi berdasarkan penilaian indeks kerentanan sosial dari PERKA BNPB No.02 Tahun 2012.

Tabel 7. Parameter Kerentanan Sosial

Indikator / tingkat	Rendah	Sedang	Tinggi	Skor
Kepadatan penduduk (70%)	< 500 J/km ²	500-1000 J/km ²	>1000 J/km ²	Kelas / nilai max kelas
Rasio jenis kelamin (10%)	<20%	20-40%	>40%	
Rasio disabilitas (10%)				
Rasio kelompok umur (10%)				

Sumber: PERKA BNPB No.02 Tahun 2012

$$IKS = (0.7 \times KP) + (0.1 \times RJK) + (0.1 \times RD) + (0.1 \times RKU)$$

dimana:

IKS = Indeks Kerentanan Sosial

KP = Kepadatan Penduduk

RJK = Rasio Jenis Kelamin

RD = Rasio Disabilitas

RKU = Rasio Kelompok Umur